

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) DI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MUHAMMAD ILAL HAMDI

NPP. 30.1013

*Asal Pendaftaran Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Keuangan Publik*

Email: muhammadilalhamdiilal@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Decky Dwi Utomo, M.M

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The preparation of Regional Government Financial Statements (LKPD) must be based on established regulations and guidelines, as time goes by, procedures for financial management always change for the better. Based on the latest regulations, financial reports are currently prepared using an integrated application, namely the Regional Government Information System (SIPD). In the preparation of financial reports, the application of SIPD still has a number of problems and the quality of the competence of Human Resources (HR) also affects the results of the quality of financial reports. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the quality of the LKPD, the obstacles to the preparation of the LKPD, and the efforts made by the local government of Tanah Bumbu Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation. For informants determined by the author using the technique purposive sampling with five informants. Data analysis techniques by means of data reduction, data presentation, and conclusion and verification. **Result:** The use of the SIPD application in the process of preparing the Regional Government Financial Statements (LKPD) in Tanah Bumbu Regency has not been fully implemented because there are several problems in the system, so that the preparation of financial reports uses the manual method. In addition to the implementation of the preparation of financial reports, it was constrained by the SIPD application and the quality of Human Resources, where there were several treasurers from several SKPDs who were late in submitting their financial reports resulting in delays in the preparation of financial reports. This is due to a lack of understanding of accounting, so that the normative requirements of financial reports are said to be of poor quality. The requirements for the quality of financial reports that have not been met are relevant, for this reason the regional government has made various efforts to overcome this problem. **Conclusion:** The preparation of Regional Government Financial Statements (LKPD) using the SIPD application has not been able to run fully because there are still several problems in the system which require the preparation of financial reports to be done manually. Besides being constrained by the SIPD application, the process of preparing financial reports is also constrained by the quality of its human resources. To overcome this problem the local government continues to strive to improve the quality of government financial reports by preparing financial reports manually and paying attention to the procedures for preparing financial reports in accordance with applicable regulations. Then evaluate the needs and performance of Apparatus Resources (SDA) in each SKPD and provide BIMTEK (Technical Guidance), training or training to increase the knowledge and skills of employees who work as accountants in each SKPD. And also carry out employee regeneration to improve the quality of human resources.

Keywords: Financial Report, Quality of LKPD, Regional Financial Management, BPKAD

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus berdasarkan peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan, seiring perkembangan zaman tata cara pengelolaan keuangan selalu berubah menjadi lebih baik. Berdasarkan aturan terbaru laporan keuangan saat ini disusun menggunakan sebuah aplikasi yang telah terintegrasi yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam penyusunan laporan keuangan, penerapan SIPD masih terdapat beberapa permasalahan dan kualitas dari kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) juga mempengaruhi hasil dari kualitas laporan keuangan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas dari LKPD, faktor kendala penyusunan LKPD, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu faktor kendala tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk informan ditentukan penulis dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak lima orang. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan:** Penggunaan aplikasi SIPD pada proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Tanah Bumbu belum dapat terlaksana sepenuhnya karena terdapat beberapa masalah pada sistemnya, sehingga penyusunan laporan keuangan menggunakan cara manual. Pada pelaksanaan penyusunan laporan keuangan selain terkendala pada aplikasi SIPD dan kualitas dari Sumber Daya Manusia juga berpengaruh dimana terdapat beberapa bendahara dari beberapa SKPD yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya sehingga terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pemahaman akuntansinya yang kurang, sehingga syarat normatif laporan keuangan dikatakan berkualitas tidak tercapai. Syarat kualitas laporan keuangan yang tidak tercapai ini yaitu relevan, untuk itu pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. **Kesimpulan:** Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan menggunakan aplikasi SIPD belum dapat berjalan sepenuhnya dikarenakan masih terdapat beberapa masalah pada sistemnya yang mengharuskan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara manual. Selain terkendala pada aplikasi SIPD, proses penyusunan laporan keuangan juga terkendala pada kualitas dari SDM nya. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dengan menyusun laporan keuangan secara manual dan tetap memperhatikan prosedur penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian melakukan evaluasi kebutuhan dan kinerja Sumber Daya Aparatur (SDA) pada setiap SKPD dan membuat BIMTEK (Bimbingan Teknis), pelatihan-pelatihan atau diklat untuk menambah pengetahuan dan skill pegawai yang bekerja sebagai akuntan di masing-masing SKPD. Dan juga melakukan regenerasi pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM.

Kata kunci: Laporan Keuangan; Kualitas LKPD; Pengelolaan Keuangan Daerah; BPKAD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam memfokuskan pembangunan di daerahnya, maka dalam proses pengelolaan keuangannya juga diserahkan kepada daerah. Seiring dengan perkembangan reformasi dan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan agar

pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan arahan tersebut dibutuhkan sebuah teknologi informasi yang dapat melakukan semuanya dengan cepat dan akurat. Teknologi informasi berperan dalam menyusun laporan keuangan agar lebih efektif, efisien, dan proses integrasi agar berjalan dengan baik (Aben et al. 2021). Sistem informasi akuntansi merupakan komponen yang saling mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi (Lestari and Dewi 2020). Sehingga diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mewajibkan setiap pemerintah daerah menyediakan informasi Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdiri atas Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang dapat digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Penyajian pelaporan keuangan yang berkualitas akan menggambarkan keberhasilan dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di daerahnya. Laporan keuangan memberikan informasi aktivitas transaksi pemerintah yang dilakukan oleh suatu entitas dalam satu periode pelaporan. Pelaporan keuangan berguna dalam rangka proses pembuatan keputusan baik itu dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi karena dapat memberikan informasi mengenai sumber, pengalokasian, dan penggunaan sumber daya keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat kriteria atau persyaratan normatif yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 oleh BPK diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu daerah yang terdapat temuan dalam hasil pemeriksaan laporan keuangannya pada IHPS tahun 2021. Hasil temuannya berupa kegiatan pendafaran wajib pajak (WP) daerah pada Pemkab Tanah Bumbu belum dilakukan secara sederhana dan mudah, serta kegiatan pendataan belum dilakukan atas seluruh obyek dan subyek pajak daerah. Temuan kedua yaitu, Penetapan target retribusi daerah pada Pemkab Tanah Bumbu belum didukung dengan kertas kerja, yaitu belum diselaraskan dengan visi misi kepala daerah, dan penentuan target belum berdasarkan data yang objektif. Menurut BPK dua permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan. Akan tetapi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki waktu enam puluh hari untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK setelah laporan diterima.

(Yuliani and Agustini 2016) menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi beberapa faktor yakni kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern. Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu saat ini adalah kualitas dari sumber daya aparatur yang dimiliki dan pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat. Hasil temuan dari BPK tersebut menjelaskan bahwa kualitas SDM masih kurang dimana pengadministrasian data pada beberapa OPD yang belum optimal dan kurang jelas dalam perumusan target ataupun program kegiatan. Dan Pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengalami perubahan dengan menggunakan SIPD walaupun baru diterapkan di awal tahun 2022. Dengan diterapkannya SIPD tentunya memiliki masalah yang harus dihadapi mulai dari keterampilan dalam mengoperasikan, pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SIPD tersebut, kemampuan penunjang, kelengkapan sarana dan prasarana di kantor dan belum lagi permasalahan yang ada pada sistem itu sendiri yang dapat menghambat penyusunan laporan keuangan dengan waktu yang telah ditetapkan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Tanah Bumbu yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri masih terdapat kekurangan. Hal ini tidak lepas dari ketidaksempurnaan dalam pengembangan softwrenya yang masih terdapat banyak kendala seperti yang dikatakan (Nasution 2021) yaitu masih adanya *bug* dan *error system*, kurangnya koordinasi antar pelaksana SIPD, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian terhambat, dan hambatan lainnya dalam proses penyusunan anggaran kas, serta hambatan dalam pembuatan SPD, SPJ, SPP, SPM, dan SP2D, dan sering terjadi salah input ataupun eror pada saat melakukan input transaksi dimana transaksi yang sama ter input dua kali dan tidak apabila dihapus salah satunya maka akan terhapus semuanya. Kemudian jika ingin meperbaikinya harus menghubungi admin yang berada di kementerian sehingga proses nya kurang efektif dan efisien.

Selain itu, kompetensi dari Sumber Daya Manusia yang di miliki tergolong masih kurang sehingga proses penyusunan laporan keuangan mengalami kendala. Kendala yang dimaksud adalah terlambatnya bendahara pada beberapa OPD dalam menyerahkan laporan keuangannya dikarenakan kurangnya pemahaman akuntansi dan tidak adanya latar belakang pendidikan akuntansi yang dimiliki. Sehingga pada saat dilakukannya rekonsiliasi ditemukan masalah seperti tidak sinkron nya data pada DPA dan data pada Laporan Keuangan OPD tersebut, data aset yang tidak tercatat karenan banyak nya jumlah aset yang dimiliki ataupun kode akun yang salah, dan juga kurangnya tenaga di bidang akuntansi pada BPKAD sehingga jam kerjanya di tambah serta terdapat beberapa pegawai yang sudah terlalu tua dan perlunya regenerasi pegawai agar kualitas kerja juga meningkat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Penelitian Nadya Prameswari (2021) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Perolehan Opini Audit BPK Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga (Prameswari 2020). Pada penelitian ini ditemukan bahwa penerapan SIPD dan Kualitas LKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan opini audit BPK, perubahan atas variabel perolehan opini BPK dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan SIPD dan Kualitas dari LKPD sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dilakukan dalam penelitian ini.

Penelitian Imas Wahyu Indriyani (2017) yang berjudul Analisis Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Menerapkan E-Sistem Pada BPKAD Kabupaten Gresik (Wahyu Indriyani 2017). Pada penelitian ini ditemukan bahwa efektivitas penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan SIPKD memperoleh nilai rata-rata yang efektif sesuai dengan kriteria interval yang telah ditentukan dan masih adanya kendala pada kinerja jaringan informasi untuk menjalankan sistem SIKPD ini dan minimnya pegawai yang mampu mengatasi kendala tersebut.

Penelitian Santi Silfiani dan Nasyiah H. Purnomowati (2021) yang berjudul Efektivitas Pelaporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Pada Pemerintah Kabupaten Magelang (Silfiani 2021). Pada penelitian diketahui bahwa pelaksanaan SIMDA pada pemerintah Kabupaten Magelang berhasil meningkatkan efektivitas dan kualitas laporan keuangan sebelum menggunakan SIMDA, selain itu LKPD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Malang telah sesuai dengan SAP.

Penelitian Heni Sundari dan Sri Rahayu (2019) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018)

(Sundari, Heni and Rahayu 2019). Pada penelitian ini diketahui bahwa Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan SPI menunjukkan hasil yang sangat baik dengan hasil skor rata-rata sebesar 86%, 85%, dan 86%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan SPI berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Bandung.

Penelitian Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Lestari and Dewi 2020). Pada penelitian ini diketahui bahwa Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan SPI berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BPKAD Kabupaten Badung. Hal ini mempunyai arti bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh pegawai, selain itu untuk dapat mempermudah suatu pekerjaan diperlukan pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan diperlukan suatu sistem pengendalian intern dalam mencegah suatu kecurangan dan mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin saja terjadi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni hampir sama seperti kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan masalah umum yang diambil SIPD dan Kompetensi SDM. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya hampir semua menggunakan kuantitatif sehingga perbedaannya penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa syarat normatif laporan keuangan ada empat yaitu Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami. Dan perbedaan yang sangat terlihat adalah dari segi tempat atau lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan di BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022, faktor kendala pada penyusunan LKPD, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu faktor kendala tersebut. Selain itu juga, mengetahui perkembangan dari penerapan SIPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut (Creswell 2013) metode penelitian kualitatif adalah jenis metode untuk menggambarkan, menyelidiki, dan memahami implikasi dari berbagai individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan dalam masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif harus berdasarkan pada kenyataan yang telah terjadi di lapangan, dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh informan. Jenis penelitian ini menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara rinci, terbuka, dan mendalam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Sugiyono 2018) penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai satu atau lebih variabel (bebas) tanpa perbandingan atau hubungan dengan variabel lain.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Sekretaris BPKAD, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan BPKAD, Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD, dan Kasubid Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri dari 2

orang. Adapun analisis data dilakukan dengan Reduksi data, Penyajian data, serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Bumbu

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban atas penggunaan APBD oleh pemerintah daerah, maka setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam membantu meningkatkan pengelolaan keuangan daerah maka Kementerian Dalam Negeri menciptakan sebuah aplikasi yang diberi nama Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.

Proses pengelolaan keuangan di BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu tidak seluruhnya menggunakan SIPD, aplikasi SIPD hanya digunakan pada saat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan. Sedangkan, pada bagian pelaporan keuangan BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu penyusunan laporan keuangan dilakukan secara manual menggunakan aplikasi Excel. Dalam menyusun laporannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan itu sistem akuntansi pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan secara basis akrual dengan mengikuti prosedur dalam pelaksanaannya. Pada peraturan ini disusun karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri atas : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Munawir 2014).

1. Laporan Keuangan yang Relevan

Sebuah laporan keuangan agar dapat dikatakan relevan jika keputusan pengguna dapat dipengaruhi oleh informasi yang terdapat di dalamnya dengan membantu mengevaluasi peristiwa yang terjadi di masa lalu atau masa kini, dapat memprediksi masa depan, dan menegaskan atau menforeksi hasil evaluasi tersebut.

a. Memiliki Manfaat Umpan Balik

Bentuk laporan keuangan yang dikatakan memiliki manfaat umpan balik (feedback value) adalah pengguna anggaran maupun masyarakat umum dapat mengetahui hasil kinerja laporan yang kami buat dan dapat memberikan saran ataupun masukan. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah menyajikan laporan keuangan yang memiliki feedback value. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi yang cukup diberikan kepada para pengguna laporan keuangan untuk mengoreksi atas kinerja dari pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi dari laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

b. Memiliki Manfaat Prediktif

Secara umum tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan dan juga dapat membantu memperkirakan kualitas dari kinerja pemerintahan di masa yang akan datang. Salah satu contoh yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dengan menganalisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

c. Tepat Waktu

Yang dimaksud tepat waktu disini adalah dalam pelaporan keuangan entitas pelapor wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan menyerahkannya kepada badan yang memeriksanya seseuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh regulasi terkait. Program penyusunan LKPD dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan, sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh BPK serta jadwal yang telah ditentukan yakni 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan untuk periode 2022 ini penegasan oleh BPK dalam membuat LKPD dipercepat memberikan tuntutan dan tanggungjawab besar bagi BPKAD khususnya tim penyusun laporan keuangan untuk dapat menyelesaikannya tepat waktu, yaitu pada tanggal 5 Maret 2023 bertepatan dengan menyambut bulan Ramadhan di tahun 2023. Akan tetapi masih terdapat SKPD yang belum menyerahkan laporan keuangannya sehingga proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi terhambat. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator tepat waktu laporan keuangan masih belum tercapai sepenuhnya.

d. Lengkap

Kelengkapan dari laporan keuangan haruslah termuat informasi akuntansi dari keuangan pemerintah yang disajikan selengkap mungkin, yakni mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan nantinya. Penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang mengatur penyusunan laporan keuangan pemerintah. Salah satu yang menjadi prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah pengungkapan lengkap/penuh. Prinsip pengungkapan penuh menyatakan bahwa laporan keuangan menyediakan pengguna dengan informasi lengkap yang mereka butuhkan. Akan tetapi, dalam penyusunannya saat ini masih terdapat 3 laporan keuangan yang belum dapat diselesaikan yaitu Neraca, LO (Laporan Operasional), dan LP-SAL (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih). Ketiga laporan ini terkendala karena terdapat 3 OPD yang belum melakukan rekonsiliasi, ketiga OPD ini yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan. Ketiga OPD ini terkendala pada pegawai yang bekerja dalam kepengurusan barang dimana kurang menguasai dalam pencatatan aset sehingga pada saat rekonsiliasi dilakukan cukup lama.

2. Laporan Keuangan yang Andal

Sebuah laporan keuangan dapat dikatakan andal jika informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut bebas dari definisi yang menyesatkan dan kesalahan material, penyajian setiap fakta dengan jujur, dan dapat diverifikasi.

a. Penyajian Jujur

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan jujur apabila memuat informasi yang benar dan transaksi akuntansi serta berbagai kegiatan lainnya yang disajikan dengan cara yang cukup diungkapkan. keberadaan LKPD Kabupaten Tanah Bumbu sudah dilaksanakan dengan baik dan penyajian secara jujur baik dalam hal informasi, transaksi, dan peristiwa yang terjadi lainnya. LKPD Kabupaten Tanah Bumbu disajikan secara wajar dan memenuhi kualitas laporan keuangan secara jujur. Penyajian secara jujur dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada contoh tabel 1 yang menunjukkan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 1
Laporan Arus Kas (LAK) Aktivasi Operasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	CALK	2022 (Rp)
	ARUS KAS DARI AKTIVASI OPERASI	5.5.1	
	Arus Masuk Kas	5.5.1.1	
1.	Penerimaan Pajak Daerah		68.539.290.062,27
2.	Penerimaan Retribusi Daerah		8.173.314.234,00
3.	Penerimaan Dana Alokasi Umum		426.165.568.384,00
	Arus Keluar Kas	5.5.1.2	
1.	Pembayaran Pegawai		526.955.432.538,00
2.	Pembayaran Barang		712.860.281.805,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	

Sumber: LAK Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022, Diolah oleh Penulis

b. Dapat Diverifikasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan agar LKPD harus di reviu terlebih dahulu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum disampaikan kepada BPK untuk diperiksa. Terdapat instansi pemerintah yang memiliki kewenangan ataupun terlibat dalam menguji atau melakukan verifikasi terhadap LKPD. Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu sudah memenuhi kriteria andal dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana laporan keuangan pemerintah sudah diverifikasi lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda. Dan kegiatan audit yang dilakukan oleh instansi terkait tersebut menghasilkan simpulan yang tidak jauh berbeda.

c. Netralitas

Laporan keuangan yang dimaksud dalam indikator netralitas adalah informasi yang termuat dalam laporan keuangan diarahkan untuk kepentingan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Dengan indikator netralitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat memenuhi semua kebutuhan pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tanpa adanya memihak pada kepentingan pihak manapun, sehingga tidak menguntungkan pihak tertentu. Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu sudah memenuhi indikator netralitas dengan menyajikan informasi laporan keuangan yang dapat di gunakan oleh semua pihak. Dalam menyajikan laporan keuangannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selalu berdasar pada peraturan yang mengatur pelaporan keuangan.

3. Laporan Keuangan yang Dapat Dibandingkan

Informasi laporan keuangan yang berkualitas jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain umumnya. Kebutuhan pengguna akan informasi laporan keuangan yang berbeda membutuhkan cara perbandingan laporan keuangan yang berbeda pula. Menurut (Susilawati and Riana 2022) Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan dua cara, yaitu secara internal dan eksternal dengan kedua cara ini pengguna dapat menentukan kebijakan yang akan dipilih.

a. Perbandingan Internal

Laporan keuangan yang dibandingkan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. LKPD Kabupaten Tanah Bumbu yang disajikan oleh BPKAD dapat dibandingkan dan kebijakan akuntansi yang digunakan selalu sama tiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun anggaran 2022 dan 2021 yang disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2022 - 2021

Uraian	CALK	2022 (Rp)	2021 (Rp)
PENDAPATAN	5.1.1	2.872.519.131.978,18	1.664.670.905.778,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	190.238.138.138,61	158.296.425.254,00
Pendapatan Transfer	5.1.1.2	2.662.169.715.737,57	1.448.929.336.890,00
BELANJA	5.1.2	1.768.284.596.909,57	1.573.819.237.012,00
Belanja Operasi	5.1.2.1	1.306.028.529.579,57	1.187.908.097.940,00
Belanja Modal	5.1.2.2	461.640.567.330,00	336.669.279.365,00
PEMBIAYAAN	5.1.4	16.420.957.397,82	155.698.519.333,82
Penerimaan Pembiayaan	5.1.4.1	21.420.957.397,82	165.698.519.333,82
Pengeluaran Pembiayaan	5.1.4.2	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			

Sumber: LRA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022, Diolah oleh Penulis

Pada tabel di atas di tunjukkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Dengan ini dapat dikatakan LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahunnya memiliki kebijakan akuntansi yang sama dan dapat dibandingkan antar tahun. Dan jika ada perubahan kebijakan akuntansi akan menyesuaikan dengan peraturan terbaru jika ada. Maka laporan keuangan pemerrintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu sudah memenuhi indikator dapat dibandingkan secara internal.

b. Perbandingan Eksternal

Laporan keuangan yang dikatakan dapat dibandingkan secara eksternal ialah apabila entitas yang dijadikan perbandingan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama tiap tahunnya. Setiap entitas dalam kebijakan akuntansi nya semua sama karena berdasar pada peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 3 di mana di tunjukkan realisasi pendapatan masing-masing OPD selama satu tahun anggaran 2022, sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Masing-Masing OPD Tahun Anggaran 2022

No.	URAIAN	ANGGARAN (RP)	URAIAN (RP)
1.	Dinas Kesehatan	32.556.000,00	50.412.000,00
2.	RSUD Andi Abdurrahman Noor	55.500.000.000,00	78.883.222.887,85

3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.329.950.000,00	535.799.852,00
4.	Bagian Umum dan Perlengkapan	100.000.000,00	14.250.000,00
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.871.710.596.864,00	2.700.950.166.910,32

Sumber: CaLK Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan LKPD Kabupaten Tanah Bumbu sudah sesuai dengan dimensi dapat dibandingkan dengan indikator dibandingkan secara eksternal, karena setiap SKPD dapat dibandingkan kebijakan akuntansinya. Kemudian jika kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas pemerintah lebih baik dari tahun sebelumnya, maka perubahan tersebut akan diungkapkan pada periode terjadi perubahan.

4. Laporan Keuangan yang Dapat Dipahami

Pemahaman akan membaca sebuah laporan keuangan ataupun pengetahuan untuk menerjemahkan isi dari laporan keuangan diperlukan oleh pihak yang akan menggunakan laporan keuangan tersebut. Bentuk laporan keuangan pada dasarnya sama karena sudah diatur dalam pedoman pengelolaan keuangan, sehingga dalam membuat laporan keuangan bentuk nya harus dapat dipahami serta istilah yang terdapat dadlam laporan keuangan dapat lebih mudah di mengerti oleh semua orang. Diketahui bahwa bentuk dari penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan SAP, sehingga dapat di mengerti secara umum dan untuk istilah yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut pun menggunakan istilah yang biasa dipakai dalam akuntansi. Berdasarkan bentuk dan istilah yang digunakan, LP-SAL Kabupaten Tanah Bumbu sudah mengikuti format yang telah ditetapkan dan meyajikan informasi yang ada secara riil atau benar apa adanya. Sehingga dapat dikatakan Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu sudah memenuhi unsur dimensi dapat dipahami dengan bentuk dan istilah yang mudah dipahami dan dimengerti.

3.2. Faktor kendala dalam peningkatan kualitas LKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Dalam menjalankan sebuah program tidak terlepas dari yang namanya hambatan atau kendala, baik itu dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu jalan nya program tersebut agar menjadi sukses. Setelah melakukan wawancara dan observasi secara langsung, penulis menemukan beberapa kendala yang terjadi pada penyusunan LKPD sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari LKPD Kabupaten Tanah Bumbu itu sendiri.

Pertama, yang menjadi kendala utama dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah itu adalah aplikasi dari SIPD itu sendiri. Banyaknya permasalahan pada sistem SIPD yang membuat kebingungan dari Tim Akuntansi dan Pelaporan selaku yang bertanggungjawab atas penyusunan LKPD. Data informasi keuangan yang ada di SIPD seperti BKU yang tidak bisa digunakan, SPJ fungsional pelaporan masih banyak kesalahan, realisasi APBD untuk laporan penatausahaan masih belum sesuai, angka-angka dalam laporan keuangan yang tidak sesuai, dan masih banyak lagi sehingga tidak ada data laporan keuangan yang bisa digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Kedua, kurangnya tenaga Sumber Daya Aparatur (SDA) yang dimiliki oleh tim akuntansi dan pelaporan serta kualitas SDA di beberapa SKPD juga menjadi kendala pada penyusunan laporan keuangan hingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu sendiri. Kurangnya jumlah

tenaga kerja yang dimiliki oleh Tim Akuntansi dan Pelaporan sedikit mengganggu kinerja mereka, hal ini membuat mereka harus kerja lebih di luar jam kerja yang ditentukan selama proses penyusunan laporan keuangan berlangsung.

3.3. Upaya Pemerintah dalam menghadapi kendala yang mempengaruhi kualitas LKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan sistem pemerintahan sering kali terjadi, karena pada dasarnya semua kegiatan pasti ada kekurangannya. Dan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sudah mengupayakan yang terbaik untuk mengatasi kendala pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan itu.

Setelah mendengarkan jawaban wawancara dari para narasumber/informan, peningkatan kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten tanah Bumbu yang sesuai dengan karakteristik kualitatif serta untuk mempertahankan predikat opini WTP atas laporan keuangan diperlukannya upaya dalam mengatasi kendala yang telah dijelaskan sebelumnya. Upaya yang akan penulis uraikan adalah sebagai berikut:

Pertama, menyusun laporan keuangan dengan cara manual. Upaya yang bisa dilakukan BPKAD dalam mengatasi kendala pada SIPD yang tidak bisa digunakan dalam menyusun laporan keuangan satu-satunya adalah dengan menyusunnya secara manual menggunakan aplikasi excel. Mengingat tenggat waktu yang diberikan BPKAD terbilang lebih cepat dari biasanya, maka BPKAD harus berani mengambil langkah dengan meninggalkan SIPD terlebih dahulu dan berfokus pada penyusunan laporan keuangan secara manual. Meskipun lebih rumit dan tahap dikerjakan cukup banyak, BPKAD sudah siap mengambil resiko yang akan terjadi demi menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh pimpinan dan BPK.

Kedua, melakukan evaluasi kebutuhan dan kinerja SDA pada setiap SKPD. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atas kendala yang terjadi pada kinerja SDA pada beberapa SKPD adalah dengan membuat kegiatan BIMTEK (Bimbingan Teknis) dan pelatihan-pelatihan atau diklat yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini dimaksudkan agar pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh bendahara atau akuntan yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan di setiap SKPD bertambah dan skill yang dimiliki juga dapat berkembang. Selain itu, regenerasi pegawai juga diperlukan dalam meningkatkan kualitas SDM, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan satu orang saja yang karena sudah bekerja sangat lama di bidang tersebut. Perlunya pergantian pegawai dan penambahan jumlah tenaga kerja agar dapat meringankan beban pekerjaan khususnya di BPKAD dibidang akuntansi dan pelaporan serta bidang aset yang berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengelolaan keuangan daerah utamanya pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dengan cara manual dikarenakan aplikasi SIPD belum dapat dijalankan. Masalah umum yang ditemukan pada aplikasi SIPD yaitu, adanya *bug* dan *error system*, kurangnya koordinasi antar pelaksana SIPD, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian terhambat, dan hambatan lainnya dalam proses penyusunan anggaran kas, serta hambatan dalam pembuatan SPD, SPJ, SPP, SPM, dan SP2D seperti yang ditemuka pada penelitian (Prameswari 2020), dan sering terjadi salah input ataupun eror pada saat melakukan input transaksi dimana transaksi yang sama ter input dua kali dan tidak apabila dihapus salah satunya maka akan terhapus semuanya. Dengan demikian dapat dikatakan penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya efektif seperti yang disampaikan oleh (Harahap 2020). Karena belum maksimalnya dalam pengoperasian SIPD pada pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu melakukan suatu upaya dengan menyusun laporan keuangan secara manual menggunakan aplikasi excel. Upaya yang dilakukan oleh BPKAD ini merupakan satu-satunya jalan agar laporan keuangan dapat tetap tersaji sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Masalah selain SIPD juga ditemukan pada penelitian ini, yaitu kualitas SDM yang dimiliki kurang berkompeten. Hal ini dapat diketahui pada saat proses penyusunan laporan keuangan setiap OPD menyerahkan laporan keuangannya, akan tetapi terdapat beberapa bendahara OPD yang terlambat menyerahkan laporan keuangan instansinya sehingga membuat keterlambatan pada penyusunan laporan keuangan. Pejabat atau seorang akuntan di setiap OPD seharusnya memahami prosedur atau tata cara dan peraturan dalam pengelolaan keuangan, akan tetapi terdapat bendahara atau akuntan di beberapa OPD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagaimana juga disampaikan oleh (Silfiani 2021) dalam penelitiannya. Sehingga upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan BIMTEK (Bimbingan Teknis) dan pelatihan-pelatihan atau diklat yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini dimaksudkan agar pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh bendahara atau akuntan yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan di setiap SKPD bertambah dan skill yang dimiliki juga dapat berkembang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD seperti yang ada pada penelitian (Lestari and Dewi 2020) dimana disimpulkan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang dimiliki pemerintah, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal serupa juga disampaikan pada penelitian (Sundari, Heni and Rahayu 2019) bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara pada penelitian (Wahyu Indriyani 2017) mengatakan bahwa aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang digunakan tepat waktu dan efisien dalam penyusunan laporan dan dinyatakan sangat efektif, sementara penelitian ini menggunakan SIPD dan aplikasi tersebut belum dapat digunakan

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan salah satu permasalahan dimana terdapat pegawai di kantor BPKAD yang sudah sangat lama bekerja dibagian akuntansi dan sangat ahli dibidangnya terlebih dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga membuat pegawai lain menjadi ketergantungan. Kemudian setelah pegawai tersebut di mutasi, pegawai lain menjadi kebingungan dan mereka harus belajar untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Hal ini mempengaruhi kualitas kerja di kantor, untuk itu penulis menyarankan perlunya regenerasi pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan satu orang saja. Perlunya pergantian pegawai dan penambahan jumlah tenaga kerja agar dapat meringankan beban pekerjaan khususnya di BPKAD dibidang akuntansi dan pelaporan serta bidang aset yang berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pegawai yang baru masuk pun tentunya harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki basic akuntansi dan memahami regulasi terkait pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan analisa data hasil penelitian yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum sepenuhnya memenuhi syarat kualitatif laporan keuangan, karena pada dimensi Relevan terdapat dua indikator yang belum tercapai yaitu indikator tepat waktu dan indikator lengkap. Sementara ketiga dimensi lain seperti andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sudah tercapai dengan baik. Dan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang disajikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak menggunakan aplikasi SIPD. Sehingga penyajian laporan keuangan menggunakan cara lama atau manual yaitu dengan aplikasi excel dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Faktor kendala yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengelola keuangan daerah. Adapun faktor kendala yang mempengaruhi LKPD di Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
 - a. Aplikasi SIPD yang belum siap digunakan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan.
 - b. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur dan perlunya tambahan tenaga kerja serta harus adanya regenerasi pegawai di lingkungan kerja pemerintahan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi kendala yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun upaya dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun laporan keuangan secara manual dengan aplikasi excel dan tetap memperhatikan prosedur penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memberikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai masalah-masalah yang terjadi pada aplikasi SIPD dan sementara tidak digunakan sampai aplikasi tersebut diperbaiki selesai diperbaiki dan siap digunakan.
 - b. Melakukan evaluasi kebutuhan dan kinerja SDA pada setiap SKPD dengan membuat kegiatan BIMTEK (Bimbingan Teknis), pelatihan-pelatihan atau diklat untuk menambah pengetahuan dan skill pegawai yang bekerja sebagai akuntan di masing-masing SKPD. Dan juga melakukan regenerasi pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu lokasi saja sebagai model studi kasus yang dipilih. Kemudian penelitian ini mengacu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mana merupakan gabungan laporan keuangan dari semua entitas maka dibutuhkan waktu yang cukup lama dan alur penyusunan yang sangat panjang sampai laporan tersebut dapat terselesaikan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Bumbu beserta jajarannya, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji yang mana telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aben, Tom A.E., Wendy van der Valk, Jens K. Roehrich, and Kostas Selviaridis. 2021. "Managing Information Asymmetry in Public-Private Relationships Undergoing a Digital Transformation: The Role of Contractual and Relational Governance." *International Journal of Operations and Production Management* 41(7): 1145-91.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Cet. ke 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, muhammad zaky. 2020. "Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan."
- Lestari, Ni Luh Wayan Tiya, and Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi. 2020. "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 11(2): 170-78.
- Munawir, S. 2014. *Analisa Laporan Keuangan*. Ed. 4 Cet. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, Muhammad Irfan. 2021. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(2): 109.
- Prameswari, Nadya. 2020. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Perolehan Opini Audit BPK Tahun 2021 Di Kabupaten Purbalingga." 2507(February): 1-9.
- Silfiani, Santi. 2021. "Efektivitas Pelaporan Keuangan Sebelum Dan Sesudah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan) Pada Pemerintah Kabupaten Magelang." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 21: 228-51.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Sundari, Heni and Rahayu, Sri. 2019. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *e-Proceeding of Management* Vol. 6: 660-67.
- Susilawati, and Dwi Seftihani Riana. 2022. "Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Star* 11(1): 15.
- Wahyu Indriyani, Imas. 2017. "Analisis Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Menerapkan E-Sistem Pada BPKAD Kabupaten Gresik." *經濟志林* 87(1,2): 149-200.
- Yuliani, Nur Laila, and Rahmawati Dwi Agustini. 2016. "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 14: 56-64.